



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

1. [HOAKS] Informasi Lowongan Koruptor jadi Penyuluh Antikorupsi Mengatasnamakan KPK



Penjelasan:

Beredar unggahan poster di media sosial terkait lowongan bagi koruptor untuk menjadi penyuluh antikorupsi mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam poster tersebut tercantum beberapa syarat, di antaranya pernah korupsi di atas Rp 1 miliar, berkelakuan baik, hampir selesai menjalani masa hukuman, dan lulus tes psikologi.

Faktanya, KPK melalui laman Twitter resminya [@KPK_RI](https://twitter.com/KPK_RI) menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. KPK tidak melakukan seleksi ataupun menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi. KPK hanya menjajaki kemungkinan untuk menggunakan testimoni dari para mantan narapidana tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pihaknya menambahkan, untuk menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi harus mendapatkan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Antikorupsi. KPK mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan bila mendapatkan informasi sejenis, dapat mengonfirmasi melalui call center 198 atau informasi@kpk.go.id.

Hoaks

Link Counter:

- https://twitter.com/KPK_RI/status/1430485742929661958
- <https://news.detik.com/berita/d-5696600/kpk-pastikan-lowongan-koruptor-jadi-penyuluh-antikorupsi-hoax>
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/366290/narapidana-korupsi-jadi-penyuluh-antikorupsi-kpk-ri-itu-hoaks>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

2. [HOAKS] Kartu Nikah Digital Kementerian Agama

Penjelasan:

Beredar sebuah tangkapan layar dari status WhatsApp yang berisi sebuah unggahan foto kartu nikah digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pada bagian depan terdapat satu foto untuk suami, namun pada bagian belakang terdapat empat kolom untuk foto istri.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin memastikan bahwa kartu itu bukan format resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, alias hoaks. Menurut Kamaruddin, mulai Agustus 2021, Kementerian Agama memang tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik. Pasangan pengantin yang menikah di bulan ini akan mendapatkan kartu nikah digital.



Hoaks

Link Counter:

- <https://kemenag.go.id/read/beredar-hoaks-kartu-nikah-ini-penampakan-kartu-nikah-digital-kemenag-a9mgk>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

3. [HOAKS] Surat Edaran Mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu



Penjelasan:

Beredar surat edaran mengatasnamakan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu mengenai penyaluran donasi untuk tempat ibadah, yayasan atau panti asuhan. Dalam surat tersebut, tempat ibadah, yayasan atau panti asuhan yang telah terdaftar sudah diseleksi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ibu Bupati Indramayu dengan syarat mempunyai nomor rekening bank dengan mengatasnamakan lembaga dan menyertakan laporan penggunaan donasi (LPD).

Berdasarkan penelusuran, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Indramayu, Dedy Suprayogi mengatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks yang terlihat dari stempel surat yang miring dan tata bahasa surat yang tidak baku. Setda Kabupaten Indramayu tidak pernah mengeluarkan surat edaran soal penyaluran donasi. Pihaknya pun meminta kepada pengelola tempat ibadah atau yayasan panti asuhan untuk tidak menghiraukan beredarnya surat tersebut guna menghindari terjadinya penipuan.

Hoaks

Link Counter:

- <https://jabar.tribunnews.com/2021/08/26/beredar-surat-edaran-setda-indramayu-minta-donasi-untuk-tempat-ibadah-dan-panti-ini-penjasannya?fbclid=IwAR3TpSKI39TodSz2k9nKMvjf9pnZSADK4k72Y2s7A0q8GNB1UPI2nm0qKcQ>
- <https://www.facebook.com/diskominfo.indramayu/photos/a.602489706570846/2028322090654260/>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

4. [DISINFORMASI] Vaksinasi Booster Covid-19 Berbayar di SpeedLab



Penjelasan:

Beredar di media sosial Twitter unggahan pamflet tentang program vaksinasi berbayar yang digelar SpeedLab Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan *check up* Covid-19. Pada pamflet tersebut tertulis daftar harga paket Vaksinasi Gotong Royong (VGR).

Terkait hal itu, pihak SpeedLab melalui surat klarifikasinya menjelaskan bahwa pamflet tersebut dibuat pada saat aturan tentang vaksinasi mandiri berbayar akan diterapkan oleh pemerintah. Namun pada saat pemerintah membatalkan vaksinasi mandiri berbayar, pihak SpeedLab juga telah membatalkan layanan tersebut.

Disinformasi

Link Counter:

- [Klarifikasi Langsung SpeedLab Indonesia](https://klarifikasi.langsung.speedlab.id)
- <https://kumparan.com/kumparannews/viral-flyer-vaksinasi-berbayar-dan-booster-speedlab-indonesia-klarifikasi-1wOqJQqlow7/4>
- https://money.kompas.com/read/2021/08/25/213100126/soal-vaksin-berbayar-sri-mulyani--harga-dan-merek-bakal-ditentukan-menkes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5696002/viral-vaksin-covid-19-booster-berbayar-ini-klarifikasi-speedlab-indonesia>



KOMINFO

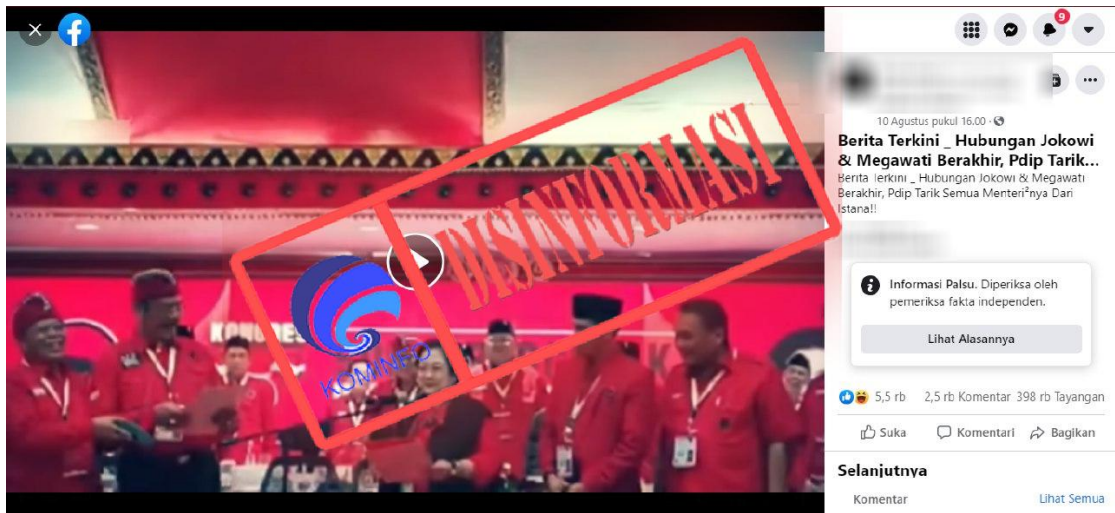
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

5. [DISINFORMASI] PDI Perjuangan Tarik Semua Kadernya di Pemerintahan Presiden Jokowi



Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan berupa video beserta narasi yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menarik semua kader PDI Perjuangan yang saat ini berada di Pemerintahan Presiden Jokowi.

Faktanya, klaim yang menyebutkan PDI Perjuangan menarik semua kadernya di Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut adalah keliru, dan tidak memiliki sumber kredibel. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media online kredibel yang membenarkan klaim pada unggahan tersebut. Saat ini, 5 Menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi yang berasal dari kader PDI Perjuangan masih aktif dalam membantu kinerja Presiden Jokowi, diantaranya yakni Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Tjahjo Kumolo (Menpan RB), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).

Disinformasi

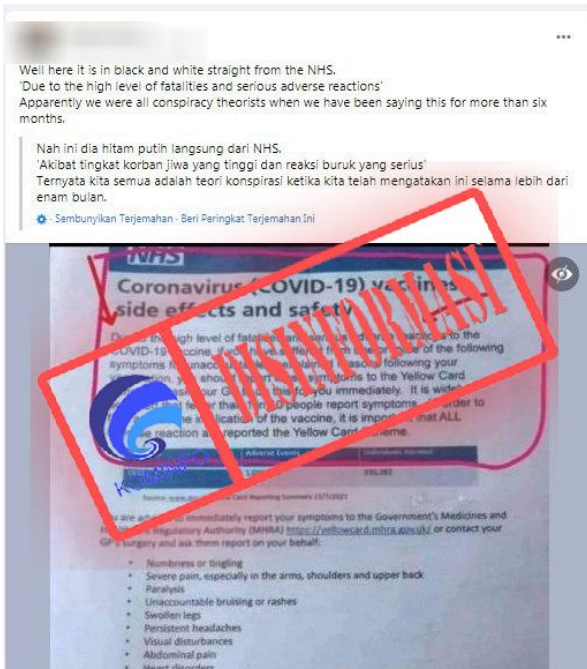
Link Counter:

- <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001580/HUBUNGAN-JOKOWI-DENGAN-MEGAWATI-BERAKHIR.-PDIP-TARIK-SEMUA-MENTERINYA-DARI-ISTANA>
- <https://cekfakta.tempo.co/fakta/1474/keliru-hubungan-jokowi-megawati-retak-hingga-pdip-tarik-semua-kader-menteri>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read253007/komposisi-kabinet-jokowi-pdip-paling-banyak>



Kamis, 26 Agustus 2021

6. [DISINFORMASI] Dokumen NHS tentang Tingkat Tinggi Kematian dan Reaksi Buruk akibat Vaksin Covid-19



Penjelasan:

Beredar sebuah gambar yang diklaim sebagai dokumen yang diterbitkan oleh *The National Health Service (NHS)*. Dokumen tersebut berisi tentang tingginya tingkat kematian dan reaksi merugikan yang serius dari Vaksin Covid-19.

Dilansir dari [reuters.com](https://www.reuters.com), surat peringatan kematian yang signifikan akibat vaksin Covid-19 tersebut adalah palsu dan tidak diterbitkan oleh NHS. Lebih lanjut Reuters juga tidak menemukan dokumen semacam itu yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan lain yang berbasis di Inggris, seperti *Public Health England (PHE)* dan *Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)*.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-britain/fact-check-nhs-headed-document-warning-of-significant-covid-19-vaccine-fatalities-is-fake-idUSL1N2PW0XM>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 26 Agustus 2021

7. [DISINFORMASI] Tagihan Biaya Perawatan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah

TANGGAL	JENIS TINDAKAN	BIAYA
Februari 2021	Pelayanan Laboratorium	3.900.000
Februari 2021	Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	5.109.661
Maret 2021	Biaya obat dan perawatan	2.924.000
April 2021	Suntik P	1.685.100
Mei 2021	Suntik IV	92.621.400
Mei 2021	Perawatan rawat inap	139.047.436
TOTAL		433.908.997

Penjelasan:

Telah beredar foto rincian total klaim rawat jalan sebesar Rp433.908.997,00 yang dikaitkan dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah.

Menanggapi isu tersebut, Pemkab Bojonegoro melalui laman resminya mengklarifikasi bahwa foto yang menunjukkan rincian total klaim rawat jalan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah sebesar Rp433.908.997,00 adalah hoaks. Selain itu, terdapat kejanggalan di foto tersebut seperti tidak ada kop surat dari RSUD dan tidak ada tanda tangan dari pihak administrasi rumah sakit serta tidak adanya stempel rumah sakit. Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dr. Achmad Hernowo turut menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak pernah mengeluarkan klaim tagihan perawatan yang jumlahnya sebesar Rp433.908.977,00. Menurutnya selama ini tidak ada tagihan perawatan Bupati Anna dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo ke Dinas Kesehatan.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/5995/hoax-tagihan-perawatan-bupati-anna-menyebar-pemkab-minta-warga-tak-percaya>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/viral-tagihan-perawatan-bupati-bojonegoro-capai-ratusan-juta-ini-faktanya-1wOtySi6Dnk>